



Operasi Jogobaran Kemungkinan Diperpanjang

● NENI RIDARINENI

Wisatawan yang datang ke Yogyakarta semakin kritis terhadap ketidaknyamanan yang mereka alami.

YOGYAKARTA — Operasi Jogobaran atau kegiatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang datang ke Yogyakarta selama libur Lebaran dimungkinkan diperpanjang jika jumlah wisatawan yang berkunjung masih banyak.

"Akan kami lakukan evaluasi. Mungkin saja diperpanjang atau dihentikan sesuai jadwal awal. Lihat kondisinya dulu," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Senin (3/7).

Operasi Jogobaran yang dilakukan secara terpadu oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya berakhir pada Se-

lisa (4/7). Namun, lanjut Haryadi, jumlah wisatawan yang tiba di Yogyakarta hingga cuti bersama berakhir masih cukup banyak.

"Masih banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta karena libur sekolah masih lama. Penumpang yang turun di Stasiun Tugu juga masih cukup banyak. Ini yang perlu menjadi salah satu bahan evaluasi nanti," kata Haryadi.

Haryadi mengatakan, pelaksanaan Operasi Jogobaran selama libur Lebaran berjalan dengan baik dan aman, meskipun masih ada beberapa temuan kasus namun bisa diselesaikan. "Memang ada pedagang kaki lima (PKL) kuliner yang menerapkan harga tinggi. Sanksi pun sudah diberikan oleh paguyuban. Begitu pula dengan temuan pelanggaran tarif parkir. Semua sudah ditangani dan diberi sanksi," kata Haryadi.

Ia pun mengingatkan bahwa Operasi Jogobaran digelar untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kebersihan selama libur Lebaran. "Pedagang atau juri parkir yang menerapkan harga atau tarif secara tidak wajar itu masuk kategori tidak tertib. Me-

rela bisa membuat wisatawan merasa tidak aman, sehingga perlu diambil tindakan," kata Haryadi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, permasalahan pelanggaran parkir pada saat-saat tertentu seperti libur Lebaran atau libur panjang lain selalu saja terulang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya aturan mengenai parkir termasuk penentuan tarif agar tidak ada lagi keluhan serupa.

Ia menyebut, wisatawan yang datang ke Yogyakarta semakin kritis terhadap ketidaknyamanan yang mereka alami saat berwisata dan kemudian mengunggahnya melalui media sosial sehingga diketahui banyak orang. "Hal-hal seperti itu harus dihindari sehingga yang nantinya viral adalah kebaikan Kota Yogyakarta," katanya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan ulah pedagang makanan di Malioboro yang menaikkan harga senaknya jelas menoreng Yogyakarta sebagai destinasi wisata. "Karena itu saya harap UPT Malioboro itu lebih

aktif. Tidak hanya menunggu aduan, tetapi memang menertibkan. Kalau UPT (Unit Pelaksana Teknis)-nya Malioboro tidak mampu, ya saya ganti. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Wali Kota Yogyakarta (Haryadi Suyuti-Red)," kata Sultan.

Ditanya apakah perlu dilakukan pencabutan izin usaha atau hanya ditutup saja lokusnya, Sultan mengatakan untuk sementara ini seperti itulah sanksinya. Namun menurut dia jangan terlalu drastis. "Harapan saya dengan akan adanya airport bertaraf internasional yang tahun 2019 selesai dibangun, kita harus bicara standarisasi. Karena tuntutan turis, baik dalam negeri maupun luar negeri itu maunya standar. Sehingga kita harus menaikkan standarisasi," kata Sultan.

Jadi, Sultan menambahkan, kalau ada pedagang yang menaikkan harga senaknya seperti itu memang harus ditertibkan sejak sekarang. "Karena tidak model lagi *ngeten mauwon saged* (begini saja bisa-Red). Sehingga kita harus mengubah pola pikir yang seperti itu," ujarnya. ■ antara ed: ternan rahadi

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Pjt. Kepala
 Substansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005